
Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila

Septiana Dwiputri Maharani

Pusat Studi Pancasila, UGM, Yogyakarta
email: septiana.dm@ugm.ac.id

Surono

Pusat Studi Pancasila, UGM, Yogyakarta
email: suronokarti@ugm.ac.id

Hadi Sutarmanto

Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta
Email: hadi_psy@ugm.ac.id

Ahmad Zubaidi

Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta
Email: ahmad.zubaidi@ugm.ac.id

ABSTRACT

The Resilience of Pancasila Ideology had ups and downs conditions. Its could not be separated from the efforts and phenomenon in the society. That phenomenon caused the resilience of Pancasila ideology be strengthened or weakened. Moreover, the condition of Indonesia was experiencing ideological problems right now. This paper described about the importance of the resilience of Pancasila ideology in supporting to national resilience, what were the factors that weakened and strengthened the resilience of Pancasila ideology, and what efforts should be made to strengthened the resilience of Pancasila ideology.

The methods used in this research were field research and library research, namely interview, FGD, survey, and literature review. This research also briefly described about the instrument of Pancasila Ideology Index (IKIP). The main aspects measured in IKIP were divinity, humanity, unity, popularness, and social justice. The indicators of IKIP were politics, nationality, social, cultural, religious and economic.

This article was written and based on research for two years (2017-2018) conducted in nine provinces in Indonesia. Namely: Manokwari (West Papua), Ambon (Maluku), Kupang (East Nusa Tenggara), Denpasar (Bali), Makassar (South Sulawesi), Medan (North Sumatra), Pontianak (West Kalimantan), Yogyakarta (Yogyakarta Special Region), and Jakarta. The location was chosen and based on the level of heterogeneity (religion, ethnicity, and culture). Sampling method used multi-stage random sampling. This article also described the portrait of resilience of Pancasila ideology in the nine (9) cities of Indonesia.

Keywords: Resilience, Pancasila, Ideology, Index of Pancasila Ideology Resilience

ABSTRAK

Ketahanan Ideologi Pancasila mengalami pasang surut. Hal ini tidak terlepas dari adanya upaya dan kejadian dalam masyarakat yang membuat ketahanan ideologi Pancasila menguat atau melemah, baik secara sengaja maupun di luar kesengajaan. Terkait dengan kondisi Indonesia saat ini yang tengah mengalami problematika ideologis,

penelitian ini sangat diperlukan untuk mengkaji pentingnya ketahanan ideologi Pancasila dalam mendukung ketahanan nasional; apa saja faktor yang memperkuat dan memperlemah ketahanan ideologi Pancasila; serta upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ideologi Pancasila.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pustaka, di antaranya wawancara, FGD, survei, dan kajian pustaka. Penelitian ini juga menjelaskan secara ringkas instrument Indeks Ideologi (IKIP). Aspek utama yang diukur dalam IKIP ini adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pada setiap aspek dikategorisasikan lagi ke dalam indikator-indikator yaitu yaitu politik, kenegaraan-kebangsaan, sosial, kebudayaan, keagamaan, dan ekonomi.

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian selama dua tahun (2017-2018) pada sembilan provinsi di Indonesia, yaitu Manokwari (Papua Barat), Ambon (Maluku), Kupang (NTT), Denpasar (Bali), Makassar (Sulawesi Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Yogyakarta (DIY), Jakarta (DKI Jakarta), dan Medan (Sumatera Utara). Pemilihan lokasi berdasarkan tingkat heterogenitas agama, suku, dan budaya. Metode penentuan lokasi survei menggunakan multi-stage random sampling. Pada akhir artikel ini juga dipaparkan hasil pengukuran tingkat ketahanan ideologi Pancasila pada sembilan lokasi tersebut.

Kata kunci: Ketahanan, Ideologi, Pancasila, Indek Ketahanan Ideologi Pancasila,

PENGANTAR

Permasalahan ketahanan ideologi Pancasila saat ini sedang membelenggu bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat dari munculnya berbagai isu gerakan pembentukan negara berbasis agama sampai dengan praktik-praktik liberalisasi di berbagai aspek kehidupan. Permasalahan ideologi memiliki dampak yang luar biasa besar. Ketika ideologi bermasalah maka seluruh aspek kehidupan suatu bangsa akan bermasalah. Karena pada dasarnya ideologi Pancasila adalah penentu arah perjalanan suatu bangsa. Berkaca pada hal tersebut maka berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ideologi mendesak untuk dilakukan. Pada tahap awal, upaya penyelesaian masalah tersebut adalah dengan melakukan diagnosa terhadap kondisi ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia.

Diagnosa terhadap ketahanan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila (IKIP). Instrumen ini secara khusus didesain untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia. Selain itu IKIP juga bisa digunakan untuk mendeteksi sedini mungkin berbagai potensi pelemahan ideologi Pancasila di suatu daerah.

Ketika potensi melemah dan pelemahan ideologi Pancasila terdeteksi secara dini maka berbagai hal yang mengarah pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia bisa segera tertangani dengan baik. Instrumen semacam ini sangat dibutuhkan Indonesia di tengah-tengah berkecamuknya *proxy war* di dunia. Pada level berikutnya pemangku kepentingan bisa menggunakan hasil pengukuran IKIP untuk menyusun program - kebijakan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan.

IKIP menjadi sangat penting mengingat persoalan ketahanan nasional dan ideologi semakin mengemuka. Kenyataan tersebut sesuai dengan kajian Mugasejati (1999) yang menyimpulkan bahwa sejak gelombang globalisasi melanda dunia, ruang lingkup permasalahan ketahanan nasional dan ideologi memasuki periode baru. Dalam tulisannya, "Agresivitas Amerika: Agenda Baru Ketahanan Nasional dalam Era Globalisasi", ia menyebutkan bahwa secara politik internasional, globalisasi tidak bekerja secara otomatis. Ada aktor yang secara sistematis berusaha menggerakkan globalisasi, baik pada tataran ideologi melalui publikasi atau penyebaran gagasan yang mengagungkan proses globalisasi, maupun tataran politik

melalui tekanan untuk liberalisasi ekonomi bagi negara-negara di dunia (Mugasejati, 1999: 39).

Ancaman terhadap ideologi tersebut dikemas melalui berbagai macam isu yang sering tidak disadar oleh suatu bangsa. Misalnya isu-isu demokratisasi, HAM, dan kelestarian lingkungan hidup di negara-negara berkembang. Salah satunya adalah tuntutan kelestarian hutan tropis di Indonesia. Sementara itu, negara-negara berkembang pada umumnya masih harus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Seperti halnya Indonesia yang masih sering dilanda konflik disintegrasi, serta adanya oknum-oknum yang tidak atau kurang memahami Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, semua itu merugikan kepentingan bangsa yang sedang berjuang mengisi kemerdekaan (Suryosumarto, 1996: 61).

Keberadaam IKIP ini diharapkan akan menjadi salah satu solusi pemecahan berbagai masalah kebangsaan di atas. IKIP ini disusun melalui penelitian di sembilan lokasi terpilih di Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat heterogenitas suku bangsa (etnik), agama dan kepercayaan, dan kependudukan. Lokasi penelitian adalah Manokwari, Ambon, Kupang, Denpasar, Makassar, Pontianak, Yogyakarta, Jakarta, dan Medan. Penelitian ini menggali data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digali dengan menggunakan metode wawancara terhadap informan yang memiliki pemahaman yang baik tentang ideologi, Pancasila, dan ketahanan nasional. Selain itu juga menggunakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang menghadirkan pakar ideologi, pakar filsafat, sejarawan, pakar Pancasila, ahli bahasa, ahli kependudukan, budaya, dan ahli statistik. Data kualitatif digunakan untuk

menyusun aspek-aspek dan indikator-indikator apa yang dibutuhkan dalam menyusun IKIP. Setelah instrumen awal IKIP tersusun kemudian dilakukan uji coba lapangan dan uji expert. Uji lapangan instrumen dilakukan sebanyak dua kali di Sleman.

Setelah instrumen teruji dan valid kemudian digunakan untuk mengukur ketahanan ideologi Pancasila di sembilan wilayah di Indonesia. Pengukuran ketahanan ideologi Pancasila ini dilakukan terhadap responden yang berumur antara 17—40 tahun. Dari rentang umur tersebut, subjek penelitian dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu remaja, dewasa awal, dan dewasa tengah. Jumlah subjek penelitian pada masing-masing wilayah berjumlah 120 orang sehingga total responden adalah 1080 orang. Pengambilan subjek penelitian menggunakan *multistage random sampling* pada masing-masing wilayah tersebut.

IKIP ini ke depan diharapkan akan menjadi salah satu indikator yang dirujuk dan digunakan pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan nasional.

PEMBAHASAN.

Hubungan antara ketahanan nasional dengan ideologi Pancasila merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ideologi Pancasila merupakan alat pemersatu dan penguat ketahanan nasional. Pada awal pembentukan negara Indonesia. Ideologi Pancasila disepakati secara politik yang mendasari dibentuknya negara Indonesia. Ideologi ini akan digunakan sebagai arah dan cita-cita membangun bangsa dan negara. Ideologi Pancasila dibangun sebagai gagasan atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kaelan (2002) menyatakan bahwa jati diri bangsa Indonesia

adalah nilai-nilai yang lahir dari hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik dan mulia yang menjadi watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia.

Pancasila juga memiliki ciri sebagai ideologi terbuka, yang berarti nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan jaman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat dinamis inilah yang sangat dibutuhkan dalam tetap menjaga ketahanan nasional di tengah arus perubahan modern. Di samping itu Pancasila juga memiliki sifat sebagai ideologi yang komprehensif. Sifat inilah yang sangat penting dalam mendasari ketahanan nasional. Ideologi komprehensif adalah suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial dan menyeluruh. Ideologi Pancasila tidak berpihak pada golongan tertentu karena dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia itu mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang sifatnya beragam (Mahendra, 1999). Ciri komprehensif lainnya adalah terletak pada esensinya, yaitu nilai-nilai Pancasila merupakan prinsip dasar dalam hidup bersama dalam suatu kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dari suatu bangsa yang beraneka ragam budaya dan agama. Kondisi keanekaragaman tersebut bersepakat mendirikan suatu negara-bangsa demi terwujudnya cita-cita bersama yaitu suatu kualitas kehidupan dalam suatu negara (Kaelan, 2018).

Mengenal Ketahanan Ideologi Pancasila

Pembahasan ketahanan ideologi Pancasila tidak bisa terlepas dari Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *national resilience* karena dianggap memiliki

pengertian yang dinamik, aktif, dan pro-aktif. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan. Ketahanan nasional juga mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita nasionalnya (Suryohadiprojo, 1997: 14). Hal tersebut dapat dimengerti sebab salah satu peran konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan dan pembangunan nasional (Suryosumarto (1997: 35).

Salah satu elemen penting dalam menggapai ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi. Untuk kasus di Indonesia, ideologi yang dimaksudkan adalah ideologi Pancasila. Hal tersebut ditegaskan Suryosumarto (1997: 34) dalam kajiannya yang menyebutkan bahwa ketahanan nasional mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila dalam segenap aspek kehidupan nasional. Berbicara tentang ideologi Pancasila, suka tidak suka, kita juga harus merujuk pada pidato Ir. Soekarno dalam Sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut ia menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia (Soekarno, 2008). Selain itu, peran Pancasila dalam perdamaian dunia juga memegang peran yang sangat vital karena mampu menjadi ideologi penyeimbang antara sosialisme dan kapitalisme. Hal tersebut sesuai dengan semangat dan cita-cita luhur para

pendiri bangsa Indonesia yang menginginkan terwujudnya perdamaian dunia.

Dalam penelusuran awal kepustakaan, ditemukan adanya karya ilmiah yang berhubungan dengan ketahanan ideologi. Karya ilmiah tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan kajian untuk menggali gagasan dan konsep-konsep yang lebih dalam. Salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh Lemhannas pada tahun 2013. Kajian tersebut mampu menggambarkan peta ketahanan nasional di Indonesia, termasuk di dalamnya ketahanan ideologi (Lemhannas, 2013). Kajian tersebut disusun sebagai sebuah upaya untuk melihat bagaimana tingkat ketahanan ideologi bangsa Indonesia. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi dan disempurnakan. Misalnya, dalam hal melakukan kajian terhadap ketahanan ideologi yang tidak secara khusus menyebutkan Pancasila sebagai sumber acuan. Selain itu, variabel-variabel dan indikator ketahanan masih belum tersistematika dengan baik. Sementara itu, variabel-variabel yang digunakan sifatnya juga masih sangat umum dan berfokus pada kelembagaan. Dalam kajian tersebut belum menyentuh level individu, padahal ketahanan ideologi sangat dipengaruhi oleh ideologi apa yang ada di kepala seseorang. Upaya dan studi penguatan ketahanan ideologi Pancasila sendiri sudah dirintis oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM) sejak tahun 2011, melalui *riset grand design* pembudayaan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.

Hasil studi menunjukkan bahwa penguatan ideologi Pancasila bisa dilakukan dengan cara membudayakan nilai-nilai Pancasila secara masif dan sistematis menggunakan metode inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya tersebut

dilakukan mengingat pentingnya prospek ketahanan nasional terhadap generasi muda pada masa mendatang. Hal itu sesuai dengan analisis Suryosumarto (2001: 23) yang menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak dapat terlepas dari faktor-faktor perkembangan berbagai segi kehidupan dalam ranah global, regional, dan nasional. Suryosumarto, dalam kajiannya “Prospek Ketahanan Nasional dalam Era Reformasi dan Otonomi Daerah”, juga menyebutkan berbagai contoh studi kasus yang memperlihatkan perlunya penguatan ketahanan nasional dan ideologi.

Penguatan ketahanan ideologi perlu dilakukan mengingat dalam perkembangan global terlihat adanya dominasi kepentingan ekonomi dan perdagangan setelah berakhirnya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yang berpengaruh terhadap negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Dalam perkembangan regional, ketahanan nasional berhadapan dengan kesepakatan tentang perdagangan bebas. Sementara dalam perkembangan nasional, ketahanan nasional dihadapkan pada pengaruh kehidupan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan pasca-1998 (Suryosumarto, 2001: 23-24). Sementara itu, kajian Maharani menunjukkan bahwa pembudayaan nilai-nilai Pancasila minimal harus dilakukan dalam tiga tataran, yaitu sistem, pelaku atau aktor, dan model/metode (Maharani, 2015).

Nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan, harus diterjemahkan ke dalam variabel dan indikator yang mudah diaplikasikan dalam masyarakat. Sisi aplikatif Pancasila seperti disebutkan di atas, akan mudah diwujudkan apabila Pancasila itu sendiri bersifat terbuka dan dinamis.

Dengan kata lain, Pancasila jangan sampai bersifat kaku atau terlalu doktriner. Seperti yang diungkapkan oleh Suryohadiprojo (1997: 18-19) dalam tulisannya, “Ketahanan Nasional Indonesia”, bahwa doktrin memang diperlukan sebagai pedoman pemikiran. Namun, doktrin tidak boleh kaku dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, doktrin yang terlalu fleksibel justru dapat membuat bangsa lepas dari pedoman Pancasila. Implementasi yang dilakukan secara terbuka, tidak kaku, dan dinamis akan meningkatkan ketahanan ideologi Pancasila, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan. Di samping itu, upaya pembudayaan juga perlu dikembangkan. Baik itu dalam hal teknik, substansi, maupun cakupan wilayah pembudayaan. Caranya, melalui berbagai kajian, workshop, seminar, sosialisasi, pelatihan, lomba, kampanye lagu-lagu nasional/perjuangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, kementerian teknis, Pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat agar hasilnya menjadi maksimal (Maharani, 2015).

Jika nilai-nilai tersebut sudah berkembang dengan baik, maka secara otomatis ketahanan ideologi Pancasila bisa diraih. Uraian di atas menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan upaya lebih jauh agar ketahanan ideologi Pancasila di suatu daerah bisa terukur.

Urgensi Ketahanan Ideologi

Pertempuran antar berbagai ideologi di dunia memungkinkan semakin kerasnya usaha untuk saling menjatuhkan, termasuk terhadap Pancasila. Suryohadiprojo (1997: 18) menegaskan tentang adanya berbagai tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap

Pancasila dalam kehidupan saat ini yang berasal dari luar maupun dalam negeri.

Ancaman dari luar negeri tampak pada adanya pihak-pihak yang ingin mengkampanyekan pandangan hidupnya untuk diberlakukan bagi seluruh umat manusia misalnya dengan munculnya liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. termasuk bangsa Indonesia. Sementara dari dalam negeri, masih ditemui adanya pihak-pihak yang tidak setuju dengan dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara. Kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berbuntut pada keputusan pemerintah HTI pada 19 Juli 2017 mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut adalah contoh nyatanya. Selain itu, muncul pula kelemahan yang disebabkan oleh adanya pertentangan dalam hal perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila.

Pancasila terbukti menjadi ideologi pemersatu bangsa karena jika Pancasila hancur, hancurlah Indonesia. Jacob dalam kajiannya “Disintegrasi Moral Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional”, menyimpulkan bahwa sangat sulit bagi negara-negara berkembang untuk membebaskan diri dari nilai-nilai Amerika yang dominan. Misalnya, hedonisme yang egositis, materialisme dan hiburan dangkal, eksploitasi lingkungan berlebihan, individualisme yang radikal, depersonalisasi, pemusatan kekuasaan berlebihan, kebijakan yang pragmatis dan reaktif, serta pendidikan yang hanya menjadi embel-embel pasar. Hal tersebut disebabkan adanya hegemoni atau imperialisme informasi yang memengaruhi gaya hidup, daya pikat hutang dan kemewahan, teknik nutritaitment McDonaldisasi dan Disneyisasi yang melengahkan, dan sebagainya (Jacob, 1999: 6).

Selama ini Pancasila telah teruji menjadi pandangan hidup yang dibutuhkan bangsa dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilannya. Dengan penjiwaan terhadap nilai-nilai Pancasila, Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa terjaga karena Pancasila dapat menjadi tameng penguat ketahanan nasional. Sepengetahuan Tim Peneliti, belum ada instrumen yang mampu mengukur dan mendeteksi secara dini tingkat ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia.

Kajian tentang ketahanan ideologi Pancasila memiliki banyak manfaat. Secara akademis riset ini mampu menjembatani tataran konsep dan praktis konsep-konsep ke-Pancasila-an. Secara praktis, hasil riset ini mampu digunakan untuk: mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila pada generasi muda Indonesia, mengukur tingkat keberhasilan pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat, mendeteksi gejala-gejala yang berpotensi memperlemah ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia, dan menyusun rekomendasi kebijakan dalam memperkuat ketahanan nasional. Di samping itu, IKIP dapat menentukan level ketahanan ideologi Pancasila pada suatu wilayah di Indonesia.

Prinsip Ketahanan Ideologi Pancasila

Ada persoalan yang terjadi di negara Indonesia yaitu ketidaksinkronan antara *das sollen* dan *das sein*. Artinya, antara nilai dan fakta tidak berjalan dengan baik. Moralitas yang dibangun seringkali tidak berdasar pada apa yang seharusnya dilakukan dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila yang sejak dahulu sudah teraktualisasi dalam adat, budaya, dan religiusitas. Pancasila seringkali hanya dijadikan sebagai simbol

tanpa dibarengi oleh bentuk aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya Pancasila dijadikan sebagai sebuah ideologi negara? Pancasila adalah sistem ideologi bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sansekerta: *pañca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip atau asas. Sebagai istilah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum dijadikan sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila sudah lahir dalam sejarah bangsa.

Ideologi suatu negara akan berdinamika sesuai dengan perkembangan dalam kehidupan negaranya. Indonesia tentu saja mengalami dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, menjadi catatan sejarah bagaimana Pancasila digunakan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga memunculkan sebuah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi Pancasila dapat dimaknai sebagai kondisi dinamik ideologi bangsa Indonesia yang berisi ketangguhan dan keuletan yang membentuk kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Sifat keterbukaan Pancasila selalu dipertanyakan dalam setiap rentang waktu dalam menghadapi fenomena yang ada. Keterbukaan seperti apa yang diharapkan untuk tetap mendudukkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Bagaimana juga individu seharusnya bersikap dalam setiap dinamika bangsa, mengingat problem keseharian senantiasa dapat menjadi penghambat atau pendorong suatu pandangan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi ialah sistem nilai.

Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi masyarakat baik secara

individual maupun sosial. Pembahasan ketahanan ideologi di Indonesia relevan sekali jika dikaitkan dengan proses bagaimana ideologi dibangun dan dipertahankan karena selalu berhimpitan dengan persoalan kepentingan individu dan sosial. Tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan ideologi di era globalisasi adalah merebaknya perilaku masyarakat yang cenderung memilih liberalisasi sebagai nilai yang dianggap positif, seraya mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Dekadensi moral telah melepaskan nilai Pancasila, juga nilai ketuhanan dengan mengalirnya radikalisme dan konflik antarumat beragama, lunturnya nilai kemanusiaan dengan perbuatan yang tidak beradab, dan sebagainya. Nilai-nilai yang dibangun kemudian dapat mengancam nilai persatuan dan kesejahteraan manusia. Berkaitan dengan ideologi, Jusuf (2008) menyebutkan ada beberapa hal berpengaruh pada ketahanan ideologi, yaitu (1). Wilayah perbatasan relatif jauh dari pantauan pemerintah pusat. (2) Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak memadai. (3). Kecenderungan masyarakat setempat kepada negara tetangga. (4). Penggunaan mata uang asing (di wilayah perbatasan tertentu). (5). Maraknya penyelundupan. (6) Pemalsuan dokumen. (7). Pemanfaatan jalan setapak. (8). Terjalannya hubungan keluarga diantara masyarakat perbatasan. (9). Tenaga kerja. (10). Banyaknya pulau-pulau kecil di sekitar perbatasan. (11). Kesenjangan tingkat ekonomi.

Indonesia sangat rawan dengan kondisi seperti di atas, jika tidak dapat mengelola sumber daya manusia, alam, dan fasilitas yang seharusnya diberikan. Mengingat secara geografis Indonesia wilayahnya berjauhan, maka pulau-pulau kecil, pulau

dalam perbatasan, sangat rawan terhadap ancaman ketahanan ideologi. Kesenjangan ekonomi merembet pada model tenaga kerja, ketrampilan dan jenis pekerjaan, eksploitasi perempuan misalnya, menjadi persoalan dalam hal ini. Masyarakat harus menyadari bahwa perubahan perilaku dengan membawa nilai yang baru tentu akan berpengaruh pada bangunan negara yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam nilai Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila harus dijadikan sebagai alat untuk menjaga munculnya disintegrasi bangsa.

Penting menjaga aspek-aspek untuk diterapkan dan dipahami oleh setiap masyarakat dan bagaimana mereka berelasi untuk mengikat kerjasama baik di dalam maupun di luar. Masyarakat harus menyadari bahwa nilai Pancasila berpengaruh pada sikap dan perilaku atas relasi ke dalam dan ke luar. Untuk membangun relasi ke dalam, masyarakat harus menjaga keberagaman sebagai realitas yang ada sebagai suatu kekayaan. Untuk membangun relasi ke luar, nilai-nilai Pancasila berperan menjadi alat pemersatu untuk mempertahankan integrasi dan kesatuan bangsa. Jika salah satu atau keduanya diabaikan, maka secara perlahan namun pasti keutuhan dan ketahanan ideologi Pancasila mulai bergeser melemah.

Sebagai filter, Pancasila mampu beradaptasi dengan dinamika dunia, dan tak ada satupun nilai yang harus ditanggalkan. Berdampingan dengan ideologi dunia, Pancasila mempunyai nilai universal dan secara khusus konkret mempunyai makna sebagai alat yang disepakati secara politis menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Persoalan yang seringkali muncul terlebih dahulu adalah primordialisme, yang diakibatkan oleh prasangka buruk (negatif)

dan stereotip. Ketika prasangka buruk dan stereotip dikedepankan tanpa didasari oleh pengetahuan dan bukti historis yang benar dan memadai, maka tumbuhlah benih-benih konflik antar individu/etnis/sub etnis/agama/budaya yang bersumber dari pemahaman secara parsial terhadap perilakunya serta simpulan yang tidak adil. Dengan teori personalitas, individu yang melakukan hal tersebut, dalam menilai baik atau buruknya orang lain, mempunyai kecenderungan untuk menggunakan ukuran moralitas berdasarkan dominasi kelompok yang satu atas kelompok yang lain.

Seringkali secara psikologis mereka penuh kemarahan dan kegelisahan masa kecil, yang setelah dewasa berkembang menjadi pribadi yang penuh permusuhan, agresif, dan selalu mencari kambing hitam. Dalam teori budaya, sikap prasangka negatif ini kerap dipengaruhi oleh budaya di mana ia tinggal, minoritas dan mayoritas menjadi fakta dominasi, dan pengalaman historis yang mengajarkan mereka melakukan hal tersebut. Bentuk dan cara mengatasi konflik tentu sangat beragam. Sikap yang muncul dalam menghadapi konflik tergantung pada segmen dalam masyarakat dengan metode masing-masing dalam menyikapi relasi yang dibentuk. Relasi itu berpengaruh pada relasi antaragama, etnis atau sub etnis, dan sebagainya. Dengan demikian nilai Pancasila digunakan sebagai cara mengatasi problem dan konflik yang ada.

Instrumen Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila (IKIP)

Dalam upaya penyusunan instrumen penelitian, tim peneliti melakukan berbagai metode supaya diperoleh hasil yang maksimal. Menjadi sebuah diskusi yang menarik ketika membahas tentang dasar yang akan digunakan

dalam menyusun indikator. Setelah melalui diskusi panjang dalam FGD bersama para pakar dan generasi muda, wawancara mendalam dengan pakar dari berbagai lembaga negara (Kemendagri, Lemhannas, Bappenas, dan lain-lain), serta diskusi intensif tim peneliti, akhirnya dicapai beberapa kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut kemudian tertuang dalam sebuah instrumen yang kemudian digunakan sebagai patokan dalam menyusun *blueprint* Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. Berdasarkan hasil FGD bersama pakar dan generasi muda, disepakati bahwa Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila merupakan sesuatu yang sangat mungkin untuk disusun. Hal itu berdasarkan pemahaman bahwa Pancasila pada hakikatnya adalah suatu kesepakatan filosofis dan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Kesepakatan menerima Pancasila bisa diibaratkan sebagai kontrak sosial seluruh elemen bangsa dalam mendirikan negara.

Tujuan pokok perumusan Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dengan konsekuensi seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara berasaskan sistem nilai Pancasila. Proses kelahiran Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi besar lainnya, seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, dan lain-lain. Pancasila digali dan dikembangkan oleh para pendiri negara melalui proses pengamatan, pembahasan, dan konsensus yang cermat berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian disublimasikan menjadi prinsip hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan proses kausalitas perumusan dan pembahasan Pancasila tersebut, dapat dipahami bahwa kausa materialis Pancasila yang berupa nilai-nilai kultural dan religius,

pada hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Pendeknya, perkataan bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan kausa materialis bagi Pancasila. Oleh karena itu, terdapat kesesuaian secara korespondensi antara bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai suatu sistem nilai.

Pada awalnya, Pancasila merupakan suatu pandangan hidup masyarakat. Kemudian, kondisi bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan, mendorong lahirnya perjuangan untuk mewujudkan jati diri bangsa. Perjuangan tersebut terformulasi dalam suatu prinsip yang konsisten dan komprehensif, yaitu nilai-nilai Pancasila. Atas dasar proses kausalitas tersebut, Pancasila diakui kebenaran dan kesesuaiannya dengan bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya ditentukan sebagai dasar filsafat sekaligus ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut bidang politik, kenegaraan-kebangsaan, sosial, kebudayaan, keagamaan, dan ekonomi (Soemargono, tt:8).

Ketahanan ideologi Pancasila merupakan bagian dari ketahanan nasional Indonesia yang dimaknai sebagai suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan ideologi Pancasila dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar Indonesia (Sunardi, 1997: 2). Ideologi juga didefinisikan sebagai perangkat prinsip pengarahan (*guiding principles*) untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup serta kehidupan nasional suatu bangsa dan negara yang bersifat futuristik (Sastratedja, 1991: 143).

Dalam makna yang lain, ideologi merupakan suatu konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi juga memiliki fungsi dasar membentuk identitas bangsa dan memiliki kecenderungan untuk menentukan karakteristik kelompok manusia. Ideologi berfungsi menentukan kepribadian nasional dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ideologi, suatu bangsa akan dapat mempersatukan cita-cita terbaik yang mereka yakini serta mempersatukan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam konteks kehidupan manusia, ideologi dimaknai sebagai sistem nilai. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti sepakat untuk menyusun Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila berdasarkan beberapa aspek dan indikator.

Aspek yang akan diukur dalam indeks adalah nilai dasar dari masing-masing sila dalam Pancasila. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Penentuan aspek-aspek berdasarkan kandungan sila-sila Pancasila tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan fragmentasi atau pemisahan terhadap sila-sila dalam Pancasila. Hal itu dilakukan sekadar untuk mempermudah pemetaan dan pengukuran kelima aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Langkah tersebut harus diambil mengingat penyusunan IKIP notabene adalah sebuah kegiatan kuantitatif sehingga setiap aspek harus jelas dan terukur.

Upaya kuantifikasi aspek-aspek tersebut terlihat pada upaya pemberian nilai/skor untuk setiap indikator. Misalnya pada aspek pertama, yaitu ketuhanan, aspek ketuhanan dibagi ke dalam enam (6) indikator, pada setiap indikator dipecah lagi ke dalam item-item. Item-item

tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pertimbangannya, semakin baik tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara maka akan semakin baik tingkat ketahanan ideologi Pancasila. Setiap item tersebut diberi bobot/skor/nilai antara 1 – 5 poin. Skor 1 menunjukkan bobot yang lebih rendah daripada angka di atasnya. Bobot tertinggi dari item ini adalah yang memiliki nilai 5 sementara yang terendah adalah nilai 1.

Peneliti sepakat untuk menggunakan indikator-indikator yang berasal dari para ahli, yaitu politik, kenegaraan-kebangsaan, sosial, kebudayaan, keagamaan, dan ekonomi. Berbagai aspek dan indikator tersebut digabungkan sehingga menjadi sebuah instrumen pengukuran ketahanan ideologi yang komprehensif. Setelah menyusun aspek-aspek dan indikator-indikator tersebut, Peneliti mengolahnya untuk mendapatkan instrumen yang lebih sederhana dan terukur. Caranya, dengan menyusun item-item. Susunan item-item tersebut diterjemahkan menjadi pernyataan-pernyataan dalam bentuk kuesioner. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner kemudian disusun ke dalam bentuk favorabel dan unfavorabel. Pernyataan favorabel berisi pernyataan yang memihak objek penelitian. Sementara itu, pernyataan unfavorabel merupakan pernyataan yang sifatnya tidak mendukung penelitian.

Keputusan membuat dua bentuk pernyataan tersebut bertujuan untuk menghindari bias stereotip respons. Di samping itu, tujuan lainnya adalah untuk menghindari respons dari responden yang cenderung selalu setuju atau tidak setuju. Pada saat menyusun kuesioner, Peneliti melakukan penyusunan

secara acak terhadap pernyataan-pernyataan yang ada. Akibatnya, pernyataan-pernyataan yang berasal dari satu indikator tidak tersusun secara berurutan. Dalam bahasa yang lain, nomor urut dari pernyataan-pernyataan yang ada tidak menunjukkan urutan dalam indikator atau bahkan aspek IKIP. Dari hasil kajian dan diskusi panjang tim peneliti, akhirnya didapatkan beberapa hasil.

Instrumen penyusunan Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila ini terdiri atas 5 (lima) aspek, yakni aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pada setiap aspeknya, dibagi lagi ke dalam 6 (enam) indikator, yaitu indikator politik, kenegaraan-kebangsaan, sosial, kebudayaan, keagamaan, dan ekonomi. Total, ada 5 (lima) aspek, 30 (tiga puluh) indikator, dan 114 (seratus empat belas) item yang terkumpul sebelum diujikan secara empiris.

Kemudian, dari masing-masing indikator tersebut diterjemahkan ke dalam item-item yang berbeda antara satu dengan lainnya. Setelah tersusun aspek, indikator, dan item-item ketahanan ideologi Pancasila, kemudian dilakukan uji validitas (secara empiris) terhadap 920 responden yang tersebar di Ambon, Kupang, Makassar, Denpasar, Pontianak, Yogyakarta, Jakarta, dan Medan. Uji coba dilakukan terhadap responden yang berumur antara 17—40.

Pemilihan kelompok usia tersebut berdasarkan kesimpulan Hurlock yang mengatakan bahwa pada kelompok usia remaja lanjut, manusia cenderung ingin menonjolkan dirinya sendiri, menjadi pusat perhatian, idealis, mempunyai cita-cita tinggi, energi besar, bersemangat, dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. Sementara itu, pada masa dewasa awal, Hurlock menyatakan bahwa manusia sedang mengalami masa

penyesuain terhadap pola-pola hidup baru serta harapan mengembangkan nilai-nilai dan sifat-sifat yang serba baru. Berbagai ciri tersebut, oleh tim peneliti, dianggap akan mampu mendukung terbentuknya indeks ketahanan ideologi yang mendekati ideal.

Data kuesioner yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis berdasarkan aspeknya. Analisis aspek tersebut dipakai untuk melihat tingkat validitas dari masing-masing item. Uji validitas item sendiri dilakukan dengan menggunakan Analisis Korelasi Pearson. Dari proses analisis, diperoleh berbagai hasil. Pada awalnya, dari 114 item yang diuji, terdapat 76 item yang valid (lihat tabel 1). Item yang valid tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila di seluruh Indonesia. Hasil pengukuran pada delapan lokasi ini sekaligus juga digunakan untuk mencari skor/nilai patokan/standar IKIP. Nilai inilah yang akan digunakan sebagai pembanding tinggi rendahnya tingkat ketahanan ideologi Pancasila di suatu daerah (lihat tabel 2).

Tabel 1 merupakan hasil uji validitas yang dilakukan oleh tim peneliti. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa pada aspek Persatuan menunjukkan bahwa indikator ekonomi tidak menunjukkan kontribusi yang valid. Demikian pula dengan indikator keagamaan pada aspek kerakyatan juga menunjukkan hal yang sama. Berdasarkan

hasil uji di atas juga bisa dikatakan bahwa tidak semua aspek memiliki indikator yang sama (6/ enam).

Berdasarkan tabel 2 rentang ketahanan ideologi Pancasila secara lebih jelas adalah

Tabel 1
Blue Print IKIP Uji Validitas

Aspek	Indikator
Ketuhanan	Politik
	Kenegaraan-kebangsaan
	Sosial
	Kebudayaan
	Keagamaan
Kemanusiaan	Ekonomi
	Politik
	Kenegaraan-kebangsaan
	Sosial
	Kebudayaan
Persatuan	Keagamaan
	Ekonomi
	Politik
	Kenegaraan-kebangsaan
	Sosial
Kerakyatan	Kebudayaan
	Keagamaan
	Ekonomi
	Politik
	Kenegaraan-kebangsaan
Keadilan Sosial	Sosial
	Kebudayaan
	Keagamaan
	Politik
	Ekonomi

Sumber: Septiana, dkk, 2017.

Tabel 2
Kategorisasi Tingkat Ketahanan Ideologi Pancasila

Interval	Norma Kategori	Kategori
$X \leq (m - 1,5 \text{ SD})$	$X \leq 232,93$	Sangat Rendah
$(m - 1,5 \text{ SD}) < X \leq (m - 0,5 \text{ SD})$	$232,93 < X \leq 258,70$	Rendah
$(m - 0,5 \text{ SD}) < X \leq (m + 0,5 \text{ SD})$	$258,70 < X \leq 284,47$	Sedang
$(m + 0,5 \text{ SD}) < X \leq (m + 1,5 \text{ SD})$	$284,47 < X < 310,24$	Tinggi
$X \geq (m + 1,5 \text{ SD})$	$X \geq 310,24$	Sangat Tinggi

Sumber: Septiana, dkk, 2017.

bahwa suatu daerah akan dikatakan memiliki ketahanan ideologi Pancasila yang **Sangat Tinggi**, jika nilainya lebih besar sama dengan 310,24; **Tinggi**, jika nilainya lebih besar dari 284,47 – kurang dari 310,24, **Sedang** di atas 258,70 – 280,82, **Rendah**, jika nilainya lebih besar dari 232,93 – 258,70, dan **Sangat Rendah**, jika nilainya lebih kecil sama dengan 232,93. Tabel di atas menunjukkan bahwa peneliti sudah berhasil menyusun nilai standar IKIP di Indonesia. Standar nilai tersebut kemudian digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia.

Instrumen IKIP yang telah disusun di atas kemudian digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila pada sembilan provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran diperoleh hasil sebagai berikut (lihat tabel 3).

Tabel 3
Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila Pada 9 Provinsi

NO	PROPINSI	NILAI	KATEGORI
1	Papua Barat	238,45	Rendah
2	Maluku	268,16	Sedang
3	NTT	288,41	Tinggi
4	Bali	267,61	Sedang
5	Sulawesi Selatan	281,73	Sedang
6	Kalimantan Barat	261,74	Sedang
7	DIY	285,47	Tinggi
8	DKI Jakarta	258,03	Rendah
9	Sumatera Utara	261,57	Sedang

Sumber: Septiana, dkk, 2018

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pada sembilan daerah yang diteliti menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila menunjukkan angka yang berbeda-beda. Lima wilayah dari keseluruhan wilayah menunjukkan ketahanan ideologi yang sedang, yaitu Maluku, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Sedangkan daerah-daerah yang menunjukkan

angka ketahanan yang kuat adalah Nusa Tenggara Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu ada dua daerah yang memiliki tingkat ketahanan ideologi Pancasila rendah, yaitu Papua Barat dan DKI Jakarta.

Faktor Pelemahan dan Kekuatan Ketahanan Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila menghadapi gejala sosial dan tantangan sebagai dinamika ideologi pada umumnya. Era modernitas menunjukkan adanya peningkatan kebebasan dan beresiko pada sikap hidup masyarakat bangsa. Ada faktor yang bisa mengancam ketahanan ideologi dan ada faktor yang menjadi kekuatan ketahanan ideologi. Beberapa faktor pelemahan ketahanan ideologi Pancasila berawal dari realitas keberagaman, baik secara kultural, etnis dan sub etnis, bahasa, dan agama/kepercayaan. Muncul sikap-sikap intoleransi, primordialisme, stereotip, egositas dan rapuhnya empati terhadap sesama. Pelemahan ketahanan ideologi juga dipicu oleh media yang kerap melemahkan suatu etnis dan memicu konflik yang akan terjadi akibat dari kelemahan menginterpretasi suatu persoalan.

Media seringkali hanya mengedepankan bisnis dan untung, dan kerap secara tidak fair untuk menampilkan suatu realitas sosial, yaitu kemungkinan menyembunyikan fakta atau realitas. Faktor pelemahan ketahanan ideologi Pancasila juga mengancam warga negara dalam usia produktif, terutama pada pelajar/mahasiswa. Usia produktif dekat sekali dengan upaya mereka untuk mencari jati diri, membentuk identitas sesuai dengan yang diinginkannya. Oleh karena itu faktor eksternal dan internal menjadi suatu fokus untuk bisa dibenahi dengan baik. Pada

mereka yang menjadi pelajar/mahasiswa, unsur dan cara atau metode yang seharusnya diterapkan kepada mereka melalui pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting, dan ini didukung oleh sistem pembelajaran yang baik (Winarno, 2013).

Faktor kekuatan ketahanan ideologi Pancasila yaitu didasari oleh objektivitas pengalaman Pancasila sesuai dengan kearifan lokal dan tidak mengancam eksistensi masyarakat yang lain. Secara historis masyarakat seharusnya sadar bahwa bangsa Indonesia telah mengalami kehidupan dan perjuangan untuk mencapai satu tujuan bersama, dan oleh karena itu harus dipertahankan bersama juga tanpa mengesampingkan yang lain.

Pancasila harus terbuka dan aktual, Pancasila menjadi jalan untuk menyelesaikan problematika kehidupan di Indonesia untuk mengatasi problem individualitas-sosialitas, sistem eklektif inkorporatif menjadi dasar dan filter terhadap perubahan. Keberagaman harus dihayati sebagai suatu kekayaan yang dijaga dan dihormati, maka semboyan bangsa atas *Bhinneka Tunggal Ika* adalah bentuk keyakinan atas perbedaan tanpa merusak kebersamaan. Pendidikan moralitas sangat penting bagi masyarakat Indonesia, sebab Indonesia dapat disebut sebagai negara plural yang terlengkap di dunia di samping negara Amerika. Di Amerika Serikat dikenal semboyan *et pluribus unum*, yang mirip dengan semboyan Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti beraneka ragam namun hakikatnya satu. Bentuk sikap pengakuan terhadap ke-bhinneka-an dalam ke-eka-an tidak serta merta dapat tumbuh pada diri setiap manusia.

Hal itu bersumber dari karakteristik individual yang melekat pada diri manusia. Karakteristik ini tentu saja harus ditanamkan

sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang selalu siap menghadapi tantangan era modernitas. Menurut Abdillah (2013) berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, bahwa

“Untuk memperkuat integrasi bangsa dan meminimalisasi munculnya perselisihan dan konflik dalam masyarakat, revitalisasi ideologi perlu mendapatkan penekanan sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan. Hal ini dilakukan melalui perumusan operasional ideologi Pancasila yang lebih akademik dan sekaligus lebih fleksibel serta sosialisasi Pancasila baik dalam pendidikan formal maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini pimpinan agama dapat memberikan kontribusi yang positif dengan memberikan input bagi perumusan dan sosialisasinya serta menjadikan agama sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusifisme dalam masyarakat. Dan yang lebih penting adalah adanya keteladanan dari para pemimpin politik dalam mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga politik. Sejalan dengan hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya konflik antarwarga tentu saja perlu diatasi atau dihilangkan, seperti ketimpangan ekonomi dan pendidikan”.

Jika warga negara masih sibuk dengan urusan kemiskinan dan ketidakmerataan tentang pendidikan, maka konflik sering terjadi akibat dari meningkatnya sikap individualisme, seperti Thomas Hobbes mengatakan Homo Homini Lupus. Negara wajib memberi solusi atas persoalan warga negaranya, sesuai dengan hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka semakin tinggi konflik terjadi, dan semakin besar masyarakat mempertanyakan kedudukan dan eksistensi Pancasila sendiri. Ketahanan ideologi Pancasila dengan tidak melepaskan faktor pelemahan dan kekuatan, Indonesia

tetap harus membangun dan mempertahankan diri dengan mengedepankan otonomi atau kemandirian. Bukan untuk melepaskan relasi dengan negara yang lain, karena itu juga sangat penting, tetapi kemandirian itu dibangun dengan melihat potensi Indonesia. Apa yang bisa dibangun dan diperkuat, dan apa yang harus ditinggalkan. Kearifan lokal menjadi penting untuk membangun bangsa secara arif dan bijaksana. Bukan hal yang mudah mengingat bangsa Indonesia sangat majemuk.

Jika Whitehead mengemukakan bahwa manusia selalu berada dalam proses menjadi, maka perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sebelum menjadi negara Indonesia hingga masa kini, merupakan proses kementerian individu bangsa Indonesia, tentu saja menuju pada manusia Indonesia seutuhnya, berpihak pada nilai-nilai Pancasila dengan menghargai keberagaman yang ada. Namun demikian proses kementerian kerap terhalang oleh datangnya unsur atau faktor dari luar yang akan menghambat personalitas individu.

Langkah penting bagi semua warga negara Indonesia adalah berhati-hati terhadap munculnya fenomena dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berpotensi merusak dan melunturkan ketahanan ideologi negara. Misalnya, terorisme yang jelas mengganggu stabilitas keamanan, jika tidak diberantas akan berdampak pada bidang lain seperti ekonomi. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung terorisme selalu berdampak negatif terhadap masyarakat dan bangsa. Titik rawan bagi bangsa Indonesia adalah mayoritas penduduk Indonesia yang bergama Islam, dan pengaruh radikalisme akan menggoyang ketahanan bangsa. Sebuah pertanyaan yang harus dijawab bersama dengan bermunculan fenomena yang berdampak pada kelemahan

atau kekuatan ideologi Pancasila, maka apakah yang harus disiapkan bersama untuk Indonesia di masa yang akan datang? Bagaimana Pancasila benar-benar dapat dipahami oleh seluruh masyarakat dan diaktualisasikan secara sempurna untuk membangun bangsa dan negara. Pada masa Orde Baru, pendidikan Pancasila melalui PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan P4 yang sekarang sudah terhapus oleh era Reformasi.

Bagaimana kita dapat memprediksi wajah bangsa Indonesia di masa yang akan datang? Oleh karena itu indikator apakah yang harus dipersiapkan sekarang? Bagaimana ideologi Pancasila selalu dipahami sebagai alat bersama untuk menjaga kestabilan negara, jalan untuk menyelesaikan seluruh problematika baik di bidang privat maupun publik. Dan, bagaimana negara dan pemerintah serta rakyat bersama-sama menjadikan nilai Pancasila sebagai dasar bersama untuk mengatasi persoalan dunia.

“National integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of a country. It means that though we belong to different castes, religions and regions and speak different languages we recognize the fact that we are all one. This kind of integration is very important in the building of a strong and prosperous nation” (Kurana, 2010).

Kurana (2010) menyatakan bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun individu memiliki kasta yang berbeda, agama yang berbeda, dan berbicara bahasa daerah yang berbeda, semua harus mengakui kenyataan bahwa semua manusia adalah satu dan dalam bangsa yang satu. Jenis integrasi nasional seperti ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur.

Dengan demikian, bangsa Indonesia memberi gambaran dunia, bahwa keberagaman telah disetarakan dalam prinsip Sumpah Pemuda. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat didasarkan pada persamaan tanah air, bahasa, dan berbangsa Indonesia. Kembali pada persoalan menghadapi era globalisasi, penting menengok kearifan lokal. Kearifan lokal akan lestari jika selalu diimplementasikan dalam kehidupan konkret sehari-hari sehingga mampu menjawab arus tantangan zaman yang selalu berubah. Kearifan lokal juga harus diimplementasikan dalam kebijakan negara, misalnya perwujudan kebijakan ekonomi didasarkan pada asas gotong-royong dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud kearifan lokal bangsa Indonesia. Dengan demikian, kearifan lokal akan efektif berfungsi sebagai alat yang membekali masyarakatnya dalam merespons arus zaman. Revitalisasi kearifan lokal dan nilai Pancasila dalam merespons berbagai persoalan akut bangsa dan negara ini, seperti korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial, perbuatan melawan hukum, tindakan asusila, tindakan menentang humanisme, hanya akan berjalan jika mendapat dukungan kebijakan negara dan keteladanan. Tanpa itu, kearifan lokal hanya merupakan aksesoris budaya yang tidak bermakna. Dengan demikian nilai Pancasila yang digali dalam kearifan lokal perlu direvitalisasi utamanya dalam pendidikan baik formal maupun non formal, dan diwujudkan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi negara pada dasarnya telah mengakomodasi kearifan lokal yang hidup di Nusantara dan bukan sekedar aksesoris politik belaka.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, IKIP merupakan salah satu jawaban atas berbagai pertanyaan dari berbagai pihak yang mengungkapkan bahwa Pancasila selama ini berada pada level awang-awang dan belum mampu menyentuh level praktis. Meskipun terjadi banyak reduksi nilai-nilai Pancasila pada upaya ini, namun diharapkan dengan instrumen ini berbagai pihak bisa memanfaatkannya untuk memperkuat ketahanan ideologi Pancasila. Karena dengan ketahanan ideologi Pancasila yang kuat maka kedaulatan bangsa dan negara menjadi semakin kuat.

Kedua, IKIP disusun melalui proses dan perdebatan yang panjang mulai dari level ideologi sampai dengan menjadi indikator yang terukur. IKIP ini sifatnya kuantitatif, sehingga data yang berhasil diberikan barulah berupa angka-angka statistik. Instrumen ini ibarat sebuah kamera yang berfungsi untuk memotret kondisi ketahanan ideologi Pancasila pada suatu daerah. IKIP hanya mampu memotret data permukaan bukan kedalaman data. Seperti halnya kamera, keakuratan hasil potretan tergantung seberapa besar pixel yang digunakan. Pixel dalam IKIP ini seperti halnya responden, keakuratan data sangat bergantung pada jumlah responden yang diteliti.

Ketiga, aspek yang diukur dalam IKIP ini diambil dari nilai-nilai utama sila-sila Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kemudian dari setiap aspek tersebut dikategorisasikan lagi ke dalam enam indikator yaitu Politik, Kenegaraan-kebangsaan, Sosial, Kebudayaan, Keagamaan, dan Ekonomi. Dari setiap indikator tersebut diturunkan lagi ke dalam item-item. Item-item tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara di Indonesia. Pertimbangannya, semakin baik tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara maka akan semakin baik tingkat ketahanan ideologi Pancasila.

Keempat, pada ranah praktis, IKIP juga sudah berhasil digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila pada sembilan provinsi di Indonesia. Hali pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: Daerah yang memiliki ketahanan Kuat adalah Nusa Tenggara Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Sedang: Maluku, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara; Rendah, yaitu Papua Barat dan *DKI Jakarta*.

Kelima, instrumen IKIP yang dihasilkan dalam riset ini sudah tersusun dengan cukup baik dan terbukti sudah bisa digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila di suatu daerah. Pada tahap berikutnya bisa digunakan untuk mengukur pada level yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri, 2013, "Hubungan Agama dan Negara", dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII No. 2, Juli 2013.

Jacob, T. 1999. "Disintegrasi Moral Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional IV (3)*, <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/11950/8804>, diakses 8 November 2017, pukul 12:30.

Jusuf, S., 2008, "Konsepsi Ketahanan Nasional dalam Pengembangan Kualitas Materi Pancasila dan Kewarganegaraan", dalam *Jurnal Siositologi* Edisi 13 Tahun 7, April 2008.

Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan. 2018. *Etika Kehidupan Berbangsa, Prinsip-prinsip Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*. Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jakarta. Bekerjasama dengan Paradigma. Yogyakarta

Kurana, S., 2010, "National Integration: Complete information on the meaning, features and promotion of national integration in India" dalam <http://www.preservearticles.com/201012271786/national-integration.html>.

Lemhannas, 2013, *Ketahanan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta*, Jakarta: Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Maharani, Septiana Dwiputri, 2015, *Model Penyiapan Kader: Pelatihan Guru sebagai Kader Bangsa yang Berintegritas, Beretos Kerja, dan Bergotong Royong di Sekolah dan di Masyarakat*. Kajian Kebijakan, kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

_____, 2015, *Model Gerakan Revolusi Mental: Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Lagu-Lagu Nasional-Perjuangan sebagai Upaya Penguatan Kepribadian Bangsa yang Berkebudayaan*. Kajian Kebijakan, kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

_____, 2018, "Grand Desain Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila" *Laporan Penelitian* Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Mahendra, Yusril Ihza. 1999. Ideologi dan Negara, dalam Gazali "Yusril Ihza Mahendra, Tokoh Intelektual Muda". Rajawali. Jakarta

- Mugasejati, Nanang Pamuji, 1999, "Agresivitas Amerika: Agenda Baru Ketahanan Nasional dalam Era Globalisasi" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional IV (1)*. Diakses 8 November 2017, pukul 9:47.
- Sastrapratedja, M., 1991, *Dalam Pancasila Sebagai Ideologi. Pancasila Sebagai Landasan Ideologi Dalam Kehidupan Budaya*, Jakarta: BP-7 Pusat
- Soedarsono, S., 1997, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Internusa.
- Soekarno, 2008, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila*. Yogyakarta: PSP UGM.
- Soemargono, Soedjono, tt, *Ideologi Pancasila Sebagai Penjelmaan Filsafat Dan Pelaksanaannya Dalam Masyarakat Kita Dewasa Ini*, *Makalah Diskusi Dosen Fakultas Filsafat UGM*.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 1997, "Ketahanan Nasional Indonesia" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional II (1)*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/19163/12424>. Diakses 8 November 2017, pukul 10:35.
- Suryosumarto, Budisantoso, 1996, "Prospek Masa Depan Lembaga Ketahanan Nasional" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional I (1)*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/10829/8090>. Diakses 8 November 2017, pukul 10:25.
- _____, 1997, "Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Nasional dan Perencanaan Pembangunan" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional II (3)*, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj27cbN863XAhXCOJQKHSVYDKsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fjurnal.ugm.ac.id%2Fjkn%2Farticle%2Fdownload%2F11609%2F8640&usq=AOvVaw2PdLg0D_zI1Zo7Uvdg5CsM. Diakses 8 November 2017, pukul 09:22.
- Suryosumarto, Budisantoso, 2001, "Prospek Ketahanan Nasional dalam Era Reformasi dan Otonomi Daerah" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional VI (1)*, <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22023>, diakses 8 November 2017, pukul 14:18.
- Winarno, Sri Haryati, Moh. Muhtarom, 2013, "Strategi Penanaman Ideologi Pancasila Sebagai Solusi Terkikisnya Nasionalisme Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi", dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor XIX (2) Agustus 2013.